

ABSTRAK

Konsumen sebagai pembeli atau pemakai suatu produk berhak mendapatkan barang atau produk dengan mutu dan kualitas yang baik. Sebagian besar dari mereka tidak memperhatikan keamanan dari suatu produk yang akan dibeli. Sehingga seringkali pihak produsen atau pelaku usaha mengabaikan kepentingan konsumen terutama tentang jaminan keamanan produk makanan khususnya makanan yang tidak layak atau kadaluwarsa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Hukum Konsumen terhadap produk-produk makanan kadaluwarsa yang beredar di masyarakat dan berbagai upaya yang dilakukan oleh pelaku usaha dan instansi pemerintah atau Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam menanggulangi peredaran makanan kadaluwarsa. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode yuridis sosiologis, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.

Dari hasil penelitian, Perlindungan Hukum Konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Undang-undang ini mengatur tentang larangan para pelaku usaha dalam menjual produknya, tanggung jawab sebagai pelaku usaha, penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen, serta sanksi terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran. Upaya dari para pelaku usaha terkait dengan peredaran makanan kadaluwarsa berupa pemberian tanggal kadaluwarsa pada kemasan produk, menjamin kemasan produk yang digunakan untuk dikonsumsi aman, menggunakan bahan produksi yang aman, dan melakukan pengawasan secara rutin oleh pelaku usaha. Sedangkan upaya dari instansi pemerintah atau Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berupa himbauan kepada masyarakat, pemeriksaan sarana distribusi, dan pengawasan yang dilakukan dari tingkat produsen hingga distributor kecil.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Makanan Kadaluwarsa, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

ABSTRACT

Consumers as buyers or users of a product are entitled to get goods or products with good quality. Most of them do not pay attention to the security of a product to be purchased. So that often the producers or business actors ignore the interests of consumers, especially regarding the safety of food products, especially food that is not feasible or expired.

This study aims to determine the implementation of Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Legal Protection of expired food products circulating in the community and various efforts undertaken by business actors and government agencies or the Food and Drug Supervisory Agency. In tackling expiry food circulation . In writing this thesis, the author uses the sociological juridical method, which examines the applicable legal provisions and what happens in reality in society.

From the research results, Consumer Law Protection is regulated in Law Number 8 of 1999. This law regulates the prohibition of business actors from selling their products, responsibilities as business actors, dispute resolution between business actors and consumers, as well as sanctions against business actors. who committed violations. Efforts from business actors related to the expiry of food circulation include providing expiry dates on product packaging, ensuring product packaging used for safe consumption, using safe production materials, and carrying out routine supervision by business actors. While the efforts of government agencies or the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) in the form of appeals to the community, inspection of distribution facilities, and supervision carried out from the producer level to small distributors.

Keywords: Consumer Protection, Expired Food, Law Number 8 Year 1999 concerning Consumer Protection